

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Umum Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat di miliki oleh suatu daerah yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Daerah harus mampu mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi semua sumber keuangan daerah. Dalam melaksanakan berbagai tujuan pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan pemerintah untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, perlu meningkatkan penerimaan keuangan daerah untuk pembiayaan pemerintah secara optimal.

Adapun usaha pemerintah daerah yang perlu dilakukan meliputi :

- a. Mobilisasi yang dapat di gali ataupun diperoleh dari potensi daerah itu sendiri dengan wajar dan mengikuti peraturan.
- b. Perlu desentralisasi dalam penyusunan, perencanaan, serta pengambilan keputusan dalam memilih suatu program maupun proyek.
- c. Penyempurnaan yang berhubungan dengan subsidi, pinjaman dan bantuan sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah setempat.

- d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan program-program yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.
- e. Pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pemerintah tidak akan efektif dalam melaksanakan program-program daerah jika dana atau penerimaan daerah daerah yang kurang mencukupi. Keuangan daerah inilah salah satu kriteria untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah melaksanakan dan mengelola perekonomian daerah setempat.

### **2.1.2 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewajiban, wewenang, dan hak setiap daerah untuk mengatur daerah setempat sesuai dengan aturan. Kemudian daerah yang akan di kelola memiliki batasan-batasan wilayah yang sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah setempat. Penerapan otonomi daerah di harapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya tersebut. Otonomi daerah juga di harapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan daya saing daerahnya dalam peningkatan pembangunan perekonomian setiap daerah.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Setiap daerah memiliki kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

bertujuan agar dapat melakukan semua tugas dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perda (peraturan daerah) sesuai dengan perundang-undangan guna mengumpulkan dana untuk keperluan setiap kegiatan yang membutuhkan biaya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu di pantau peningkatannya. Jumlah dan kontribusi peningkatannya akan berpengaruh dan akan sangat berperan bagi pemerintah daerah. Kemajuan tingkat daerah dapat dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah dan peran pendapatan asli daerah yang tentunya akan berdampak positif dari tahun ke tahunnya. Setiap daerah akan memicu bagaimana agar penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya akan terus meningkat.

Pendapatan daerah dalam APBD masih merupakan salah satu elemen terpenting untuk mendukung pemerintahan daerah untuk pelayanan public secara umum. Tidak lepas dari itu pendapatan asli daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu

membayai seluruh kegiatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap daerah. Pemerintah juga akan melayani sesuai dengan kemampuan penerimaan daerahnya untuk memberi kepuasan kepada masyarakat.

Jadi, pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin daerah yang berasal dari usaha-usaha yang berasal dari daerah dan pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangan yang dapat berperan sesuai tugasnya.

Berikut perkembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Magelang sepuluh tahun terakhir ini dari tahun 2005-2014.

**Tabel 2.1**  
Perkembangan PAD Kota Magelang  
Tahun 2005 – 2014

No	Tahun	Realisasi PAD (Rp)
1	2005	Rp. 9.643.563
2	2006	Rp. 9.533.676
3	2007	Rp. 9.814.845
4	2008	Rp. 9.667.570
5	2009	Rp 12.549.584
6	2010	Rp. 12.704.619
7	2011	Rp. 12.876.009
8	2012	Rp. 13.577.702
9	2013	Rp. 15.314.602
10	2014	Rp. 16.432.000

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat sepuluh tahun terakhir Kota Magelang mendapatkan penerimaan daerah yang cukup meningkat.

Besarnya pendapatan di Kota Magelang setiap tahunnya menyebabkan kemampuan daerah mencapai keberhasilan yang diharapkan. Untuk meningkatkan kemajuan dan potensi yang lebih meningkat kota Magelang tentunya memiliki komponen-komponen dalam penerimaan daerahnya. Komponen-komponen penerimaan pendapatan asli daerah daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Retribusi Daerah
- b. Laba BUMD
- d. DAU
- e. Jumlah Penduduk
- a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan khusus yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang individu maupun badan. Retribusi daerah juga dapat diartikan bahwa kemandirian setiap daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat. Kemudian pemungutan retribusi daerah berdasar atas UU Nomor 34 tahun 2000 namun telah diubah menjadi UU Nomor 28 tahun 2009.

#### A. Obyek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat 1 telah disebutkan bahwa Retribusi Daerah merupakan beberapa jenis pungutan yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun pungutan jasa tersebut harus sesuai dengan ukuran sosial ekonominya. Jasa-jasa tersebut ada tiga jenis yaitu, jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu,

#### B. Golongan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat 2 telah disebutkan bahwa penggolongan retribusi dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan penetapan tarif retribusi.

#### C. Sumber-sumber penerimaan retribusi daerah

##### a. Retribusi Jasa Umum

- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Kebersihan
- Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- Pelayanan akte kelahiran dan biaya cetak KTP
- Pelayanan Pasar
- Pengujian peluncuran kapal perikanan
- Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Penggantian biaya cetak peta.

b. Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi tempat pelelangan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat penginapan
- Retribusi penyedotan kakus
- Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi penyebrangan di atas air
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- Pemakaian kekayaan daerah

c. Retribusi Perijinan Tertentu

- Izin penggunaan tanah
- Izin mendirikan bangunan
- Izin trayek
- Izin gangguan
- Penerimaan keuangan yang di lihat dari selisih nilai tukar uang rupiah dengan uang asing
- Pendapatan denda yang di kenakan kepada pelaksanaan pekerjaan yang terlambat
- Pendapatan atas denda retribusi

- Pendapatan yang di peroleh dari hasil eksekusi atau jaminan
- Pendapatan denda pajak
- Pendapatan dari pengembalian
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Pendapatan yang di peroleh dari angsuran ataupun cicilan penjualan
- Fasilitas soasial ataupun Fasilitas umum

Dari penjelasan teori di atas, retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di Kota Magelang selama lima tahun kebelakang ini reribusi daerah terus meningkat. Berikut ini tabel retribusi daerah di Kota Magelang dari tahun 2005 – 2010.

**Tabel 2.2**

Retribusi Daerah Kota Magelang  
Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Retribusi Daerah (Rp)
1	2010	Rp. 2.899.236
2	2011	Rp. 2.618.858
3	2012	Rp. 2.682.502
4	2013	Rp. 2.997.259
5	2014	Rp. 2.735.721

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Magelang



Tabel retribusi daerah di atas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Di Kota Magelang retribusi daerah merupakan pemasukan pendapatan yang tentunya dapat di harapkan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah di Kota Magelang yang bersumber dari masyarakat yang di kelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan pemerintah daerah Kota Magelang. Dalam rangka membangun potensial secara efektif dan efisien yang nantinya akan mendorong pendapatan dan pembangunan daerah.

Retribusi yang di pungut tentunya memiliki beberapa ciri-ciri tertentu sesuai aturan yang telah di tetapkan. Adapun beberapa ciri-ciri Retribusi Daerah yang di pungut di Indonesia yaitu :

- a. Retribusi Terutang dimana retribusi ini merupakan jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan.
- b. Pihak yang membayar retribusi daerah tentunya dapat menerima balasan jasa secara langsung oleh pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- c. Hasil dari penerimaan retribusi daerah nantinya akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.
- d. Retribusi Daerah di kenakan kepada siapa saja yang nantinya akan mendapatkan jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Sanksi yang di tetapkan yaitu, sanksi ekonomis dimana yang tidak membayar retribusi daerah tidak akan

memperoleh jasa yang telah di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

Di lihat dari ciri-ciri di atas, sumber pendapatan daerah salah satunya retribusi daerah ini di berikan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang ada di Kota Magelang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Magelang dalam upaya memenuhi kebutuhan pemerintah daerah kota Magelang.

b. Laba BUMD

BUMD adalah perusahaan yang di milki dan didirikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan Undang-undang No.25 Tahun 2000 yang menyatakan mengenai kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menjadi soroton publik, karena BUMD menjadi salah satu faktor penting yang memberikan layanan pkepada masyarakat yang tentunya berbeda dengan layanan-layanan masyarakat pada umumnya. Keberadaan dan aktivitas BUMD telah di atur dan di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD). BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ) memiliki peran dan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah
- b. Pemasukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
- c. Mendorong masyarakat dalam bidang usaha
- d. Memenuhi kebutuhan bagi kepentingan publik, kebutuhan barang maupun jasa.
- e. Menjadi peran untuk kegiatan usaha yang kurang diminati swasta.

Dari peran dan fungsi di atas, BUMD juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah mempunyai harapan terhadap BUMD terutama dalam pencapaian pendapatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah dengan BUMD memiliki hubungan yang sangat erat karena memiliki tujuan bersama untuk saling menjaga dalam perannya masing-masing sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Peran dan tanggung jawabnya BUMD sebagai pencetak pendapatan dan pelayanan publik, dalam prakteknya harus berhadapan dengan kondisi yang bergerak secara mekanisme, kondisi kinerja yang mekanisme melalui hubungan pertanggung jawaban kinerjanya oleh publik. Publik secara luas yang dimaksud adalah bagaimana pelayanan publik dapat dikelola secara maksimal dan dapat menerima masukan dari perusahaan swasta yang nantinya akan memosisikan pemerintah pada fungsi dan peran yang sangat diperlukan masyarakat. Namun, pemerintah harus tetap pada konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik, ketika kalangan

swasta mulai tumbuh dan bermunculan pemerintah lah yang mampu memberikan pelayanan secara optimal lebih dari yang di berikan selama ini.

Di Kota Magelang, semua perusahaan daerah berkembang dan meningkat karena di tangani secara profesional. Ada beberapa perusahaan milik daerah di Kota Magelang yang memberikan sumber pendapatan asli daerah diantaranya ialah :

- a) PD BPR Bank Magelang
- b) PD Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng
- c) PDAM
- d) PD Percetakan
- e) PD Perbengkelan
- f) PD BPR BKK Magelang Utara

Dari perusahaan daerah yang ada di Kota Magelang, yang meraih laba besar antara lain PD Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng pada tahun 2013 mendapatkan keuntungan Rp 2.178.167.800. Kemudian di setorkan kepada Pemerintah Kota Magelang sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.197.357.000.

Tidak hanya PD Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng namun PD BPR Bank Magelang juga menyetorkan kepada Pemerintah Kota Magelang sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun yang sama yaitu tahun 2013, sebesar Rp 1.302.698.827. Jumlah yang di setorkan

kepada Pemerintah Kota Magelang meningkat di bandingkan pada tahun 2012 PD BPR Bank Magelang menyetorkan kepada Pemerintah Kota Magelang sebesar 1.220.661.981.

Kemudian perusahaan daerah yang ada di Kota Magelang setiap tahunnya menyetorkan ke pada Pemerintah Kota Magelang rata-rata naik 10%. Namun ada salah satu perusahaan daerah yang diinvestasikan kembali sebagai penyertaan modal, seperti perusahaan daerah yang di miliki oleh Pemerintah Kota Magelang yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah memiliki kewenang sesuai dari daerah masing-masing. Di Kota Magelang setiap tahunnya memiliki peningkatan yang cukup baik dari pemasukan perusahaan daerah. Berikut tabel realisasi BUMD pada tahun 2006 – 2015.

**Tabel 2.3**

Laba BUMD

Kota Magelang

Tahun 2006 – 2015

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi BUMD (Rp)</b>
1	2006	Rp. 2.030.784
2	2007	Rp. 2.525.877
4	2008	Rp. 2.432.887
5	2009	Rp. 2.905.601
5	2010	Rp. 2.984.760

No	Tahun	Realisasi BUMD (Rp)
6	2011	Rp. 2.992.456
7	2012	Rp. 3.112.554
8	2013	Rp. 5.017.784
9	2014	Rp. 10.445.000
10	2015	Rp. 11.234.677

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Magelang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laba BUMD yang di setorkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya terus meningkat. Untuk itu BUMD merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Di Kota Magelang. Kemudian Pemerintah Kota Magelang mengharapkan perusahaan daerah di Kota Magelang terus di kelola dengan baik.

c. DAU (Dana Alokasi Umum)

Setiap daerah memiliki kewenangan dan kemampuan yang tidak sama dalam urusan keuangan. Setiap daerah juga berbeda dalam membiayai kegiatan operasional di daerah masing-masing. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa ketimpangan salah satunya ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengatasi ketimpangan tersebut dengan mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang masih memerlukan. Salah satu dan perimbangan yaitu DAU (Dana Alokasi Umum).

DAU adalah Dana Alokasi Umum yang berasal dari Pemerintah Pusat dan di berikan kepada daerah-daerah yang masih memerlukan dana dari APBN guna untuk memenuhi kegiatan operasional yang ada di setiap daerah masing-masing. Kemudian mempunyai tujuan pemerataan keuangan ke setiap daerah. Pemerintah pusat mengharapkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk melayani kegiatan publik secara efektif dan efisien.

Di Kota Magelang memiliki upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperhitungkan Dana Alokasi Umum. Kemudian dengan memperhitungkan Dana Alokasi Umum di harapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Magelang,

DAU berperan penting dalam urusan dan kegiatan operasional yang ada di Kota Magelang. Untuk itu pemerintah Kota Magelang berupaya dapat mengelola Dana Alokasi Umum yang telah di berikan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Magelang juga mengalokasikan dana tersebut dengan sebaik mungkin untuk sumber dan pembiayaan program-program pada setiap tahunnya.

Secara umum DAU berpengaruh terhadap rencana keuangan, untuk itu pembagian DAU pada setiap daerah di tetapkan sesuai dengan aturan dan kewenangan pemerintah kota/daerah masing-masing. DAU bertujuan sebagai instrument penting untuk mengatasi masalah pembiayaan yang

dialokasikan setiap daerah dan penggunaanya di tetapkan oleh daerah masing-masing.

Kebutuhan daerah dalam rangka melayani kegiatan publik pemerintah pusat memberikan DAU kepada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang di tetapkan oleh APBN. Kebutuhan daerah juga harus di tutup melalui dan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Setelah pemerintah daerah menerima dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berleluasa dalam menggunakan DAU.

Di Kota Magelang mendapatkan dan dari pemerintah pusat setiap tahunnya, kemudian pemerintah Kota Magelang mengelola dan mengatur dana tersebut secara efektif. Berikut realisasi DAU (Dana Alokasi Umum) lima tahun belakangan ini dari tahun 2011 – 2015.

**Tabel 2.4**

Realisasi DAU

Kota Magelang

Tahun 2011 – 2015

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Realisasi DAU (Rp)</b>
1	2011	Rp.5.258.029
2	2012	Rp 5.168.929
3	2013	Rp.6.708.594
4	2014	Rp.6.721.145
5	2015	Rp.7.399.601

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistika) Kota Magelang.



Dari tabel di atas, pendapatan DAU yang di berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya meningkat. Jadi, pendapatan daerah yang di peroleh dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan operasional Kota Magelang masih berjalan sesuai aturan. DAU yang di terima juga dapat di gunakan untuk keperluan publik yang nantinya akan di kelola oleh pemerintah daerah.

#### d. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang tinggal secara menetap di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk bukan menjadi masalah bagi suatu wilayah, namun bias menjadi dampak positif dan dapat bermanfaat dalam perkembangan ekonomi daerah. Bagi negara-negara maju maupun negara-negara berkembang sangat di butuhkan banyak orang yang memiliki ide atau gagasan bagi negara mapun wilayahnya tersebut. Semakin banyak orang dalam suatu wilayah atau daerah semakin banyak memiliki tenaga ahli dan bakat-bakat yang akan mendorong kemajuan tekhnologi. Kemudian dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk merupakan suatu keuntungan bagi setiap daerah masing-masing yaitu dapat merangsang pembangunan ekonomi yang akan datang.

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan barang-barang konsumsi. Hal ini kemudian akan mendorong peningkatan produksi yang berakibat meluasnya usaha-usaha maupun usaha baru pada sektor produksi. Meningkatkan usaha-usaha baru tentunya akan

memberikan celah bagi penduduk untuk meliki pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan dalam meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah melainkan sebagai salah satu unsur penting yang dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Setiap perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah yang memiliki perekonomian yang baik tentunya akan menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat.

## **2.2 Hubungan Variabel Dependent terhadap Variabel Independent**

### **a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau pembayaran atas jasa yang di peroleh dari pemerintah daerah. Penerimaan jasa tersebut merupakan usaha milik daerah yang nantinya akan di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Ada 3 jenis Retribusi :

- a. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu badan ataupun individu yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

- b. Retribusi Jasa Umum yaitu individu maupun badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- c. Retribusi Jasa Usaha yaitu individu maupun badan yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.

Retribusi daerah mempunyai jumlah pendapatan yang cukup besar dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil dari retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Magelang. Retribusi daerah menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan dan memberikan masukan penerimaan daerah yang cukup baik. Di lihat dari peran retribusi daerah terhadap PAD jika retribusi di kelola dengan baik tentunya akan semakin memperbesar penerimaan daerah. Hubungan retribusi daerah terhadap PAD mendukung pemasukan daerah yang akan meningkatkan pendapatan pemerintah Kota Magelang setiap tahunnya.

b. Hubungan Laba BUMD terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan milik daerah yang didirikan dan di bangun dengan peraturan daerah berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1962 dengan modal keseluruhan atau sebagian merupakan hasil kekayaan daerah yang di pisahkan. Adapun beberapa peran BUMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu :

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
2. Memperbaiki biaya atau dana bagi pembangunan daerah.

3. Memenuhi daerah berupa barang maupun jasa.
4. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan maupun ekonomi.

Peran BUMD yaitu dapat meningkatkan dan membangkitkan perekonomian di setiap daerah. Kemudian adanya BUMD yang di milki oleh setiap daerah dapat memberi pemasukan pendapatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun penelitian, yang menyatakan bahwa hasil dari laba perusahaan milik daerah yang di berikan kepada pemerintah daerah di harapkan memberikan laba semakin meningkat sehingga dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa BUMD yang sudah memberikan jumlah laba cukup meningkat.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Laba BUMD pada setiap daerah tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan Laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan dan cukup baik untuk tetap di kembangkan secara optimal.

- c. Hubungan DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan daerah kemudian untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. DAU dapat menyeimbangkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. DAU di tentukan berdasarkan selisih antara

kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2010 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan utama di berikan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu:

- a. Horizontal equity mempunyai tujuan yang berkepentingan kepada pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan secara merata agar tidak terjadi kekacauan antar daerah.
- b. Sufficiency merupakan kepentingan suatu daerah yang berkecukupan dalam rangka untuk menutup kebutuhan suatu daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa hubungan DAU terhadap PAD berpengaruh signifikan. Maka adanya keterkaitan terhadap PAD dapat memberi pemasukan pendapatan setiap daerah dan dapat memenuhi keperluan daerah sesuai dengan aturan setiap daerahnya.

d. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan daerah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menaikkan output melalui penambahan eskpansi pasar baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Pertumbuhan penduduk yang diiringi denfan majunya tekhnologi akan mendorong tabungan dan pengaruh terhadap skala ekonomi produksi.

Besar pendapatan akan di pengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ada juga akan meningkat. Adapaun kurva yang menunjukkan hubungan antara Jumlah penduduk dengan Pendapatan.

### **2.3 Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Anjar Setiawan (2010) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dengan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah )”.

Dalam penelitian Anjar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Retribusi Daerah, dimana DAU dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Himawan Eka Saputra (2009) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1981-2006”.

Dalam penelitian Himawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammdiyah Surakarta. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah.

3. Fitria Megawati Sularno (2013) dengan penelitian yang “Analisis Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)”.

Dalam penelitian Fitria, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Salah satu variabel yang digunakan peneliti yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), dimana DAU berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat.

4. Irwan M.Saleh (2016) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi DIY”.

Dalam penelitian Irwan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu Retribusi Daerah. Pada penelitian Irwan, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan salah satu variabel yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD )

5. Jurnal (2009) yang berjudul “Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa BUMD berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dimana BUMD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sehingga peran BUMD dapat menunjang peningkatan keuangan daerah. BUMD memiliki peran dan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

6. Putu Lia Perdana Sari ( 2013 ) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Variabel–Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi Bali”.

Dalam penelitian ini mahasiswi Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Bali.

## 2.4 Hipotesis

1.  $H_0$  : Retribusi Daerah = 0 : Retribusi Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Kota Magelang merupakan daerah dimana memiliki area maupun lokasi yang memiliki peran untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kota Magelang juga memiliki beberapa daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah untuk mengenakan retribusi. Sehingga dengan adanya pengenaan Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) . Dengan berdasarkan hal ini, maka dapat di susun hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Retribusi Daerah  $> 0$  Retribusi Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

2.  $H_0$  : Laba BUMD = 0 Laba BUMD Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perusahaan Daerah yang ada di Kota Magelang akan memberikan keuntungan pada pemerintah daerah baik dalam pelayanannya maupun dalam meningkatkan penerimaan daerah. Jika BUMD dapat memberikan peran terhadap keuangan daerah, maka di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah



(PAD) di Kota Magelang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Laba BUMD  $> 0$  Laba BUMD Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. H0 : DAU ( Dana Alokasi Umum ) = 0 DAU Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Umum (DAU) yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat pendapatan asli daerah di Kota Magelang. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pemerintah pusat yang di berikan kepada pemerintah daerah tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kota Magelang. Kemudian dengan adanya dana alokasi umum yang berikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Magelang akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : DAU(Dana Alokasi Umum )  $> 0$  DAU Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

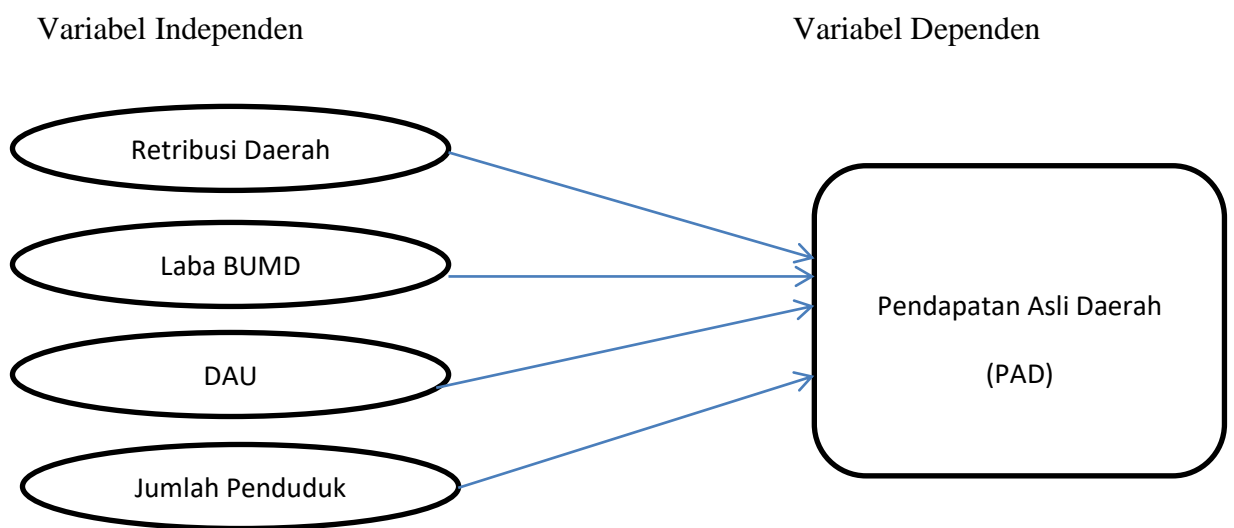
4. H0 : Jumlah Penduduk = 0 Jumlah Penduduk Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah Penduduk sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Sehingga semakin tinggi jumlah penduduk yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah yang di berikan kepada pemerintah daerah tentunya kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kota Magelang.

H1 : Jumlah Penduduk > 0 Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Magelang Periode tahun 1984 -2015 ” adalah antara lain variabel tujuan, variabel retribusi daerah, variabel laba BUMD, variabel DAU. Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**